BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran integral lalu lintas dan transportasi jalan raya dalam kehidupan sehari-hari membuat keduanya tidak dapat dipisahkan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya taraf hidup masyarakat, maka sangat penting untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat dengan menyediakan prasarana serta sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai. Kendaraan bermotor dapat dikategorikan berdasarkan jumlah rodanya menjadi ada beberapa jenis: kendaraan dengan dua roda, empat roda, enam roda, atau lebih (misalnya, truk yang digunakan untuk mengangkut barang terkadang memiliki dua belas roda).¹

Lalu lintas serta angkutan jalan mempunyai kedudukan krusial dalam kehidupan sehari – hari, baik bagi masyarakat maupun bagi perekonomian suatu daerah. Dalam konteks ini pengaturan yang baik di sektor transportasi menjadi sangat penting guna menjamin keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas. Di Indonesia hal ini diregulasi secara komprehensif dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). UU ini tidak hanya meregulasi hak dan kewajiban pemakai jalan, tetapi juga menetapkan kerangka kerja untuk pemantauan serta penegakan hukum di aspek lalu lintas.

¹ Andi Munawarman, Sejarah Sepeda Motor, www.HukumOnline.com, diakses pada tanggal 6 Oktober 2024 pukul 19.33 wib

Mengabaikan kepentingan umum dan mengabaikan kelayakan transportasi, serta batas kapasitas kendaraan pengangkut barang, salah satu kendaraan semacam itu sering kali mengubah spesifikasi yang tidak sejalan dengan standar sertifikasi yang telah dirumuskan. Misalnya, kendaraan tersebut dapat mengubah strukturnya, memperluas dimensinya, dan menggabungkan kontainer untuk transportasi kargo, sehingga meningkatkan kapasitas muatnya. Mayoritas bisnis bergantung pada alat transportasi yang tidak dapat diandalkan untuk pengadaan barang dan jasa. Masyarakat, perusahaan, dan pengemudi terkena dampak negatif dari maraknya kendaraan angkutan barang yang beroperasi secara tidak sah, melanggar peraturan perizinan dengan mengangkut barang melebihi batas maksimum atau dengan sengaja memodifikasi kendaraan mereka dengan komponen dari kendaraan angkutan barang lain untuk meningkatkan kapasitas muatan.²

Jalan raya secara rutin dilalui oleh kendaraan pengangkut barang dengan berbagai ukuran dan konfigurasi, termasuk truk gandar tunggal, truk gandar tandem, truk gandar dua, truk gandar tiga, dan kereta gandeng. Kendaraan-kendaraan ini diizinkan untuk mengangkut beragam komoditas, termasuk bahan industri. Sayangnya, ada kesenjangan antara laju kemajuan teknologi di sektor otomotif dan aksesibilitas informasi yang berkaitan dengan peraturan yang menentukan desain kendaraan tertentu. Ketidaksesuaian ini mengakibatkan

² <https://dpu.kulonprogoab.go.id/detil/694/apa-itu-truk-odol-dan-mengapa-dilarang>, diakses pada 6 Oktober 2024 pukul 21.40 wib

kendaraan melanggar peraturan yang berkaitan dengan dimensi dan beratnya.³ Spesimen kendaraan barang dengan berbagai konfigurasi gandar digunakan guna pengkalkulasian di jembatan timbang, termasuk analisis jarak sumbu roda, dimensi kendaraan barang, dimensi bak kargo terbuka, dan analisis persentase beban gandar.

Elemen penting UU LLAJ yang dirancang untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pemakai jalan adalah sertifikasi kendaraan. Kendaraan menjalani pemeriksaan teknis dan pengujian lapangan selama proses sertifikasi guna menjamin kepatuhan terhadap semua standar keselamatan. Dinas Perhubungan Kota Batu, sebagai otoritas pemerintah yang bertanggung jawab atas transportasi di Kota Batu, memainkan peran penting dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditentukan dalam peraturan ini.

Pelat nomor berfungsi sebagai bentuk alternatif identifikasi kendaraan, dengan berbagai warna yang menandakan fungsi dan makna yang berbeda. Identifikasi kendaraan yang efisien dapat dicapai melalui pemilihan warna yang tepat. Pelat nomor kendaraan tertentu ditandai dengan warna dan desain yang berbeda; misalnya, pelat nomor putih dengan tulisan hitam digunakan oleh individu, badan hukum, PNA (Perwakilan Negara Asing), dan organisasi internasional. Pelat nomor kuning dengan huruf hitam diperuntukkan bagi kendaraan angkutan umum, pelat merah dengan huruf putih diperuntukkan bagi kendaraan instansi pemerintah, dan pelat hijau dengan huruf hitam

³ Felastri, I.. Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).2016 , hlm 04

diperuntukkan bagi kendaraan yang beroperasi di zona bebas bea. Meskipun demikian, masih banyak oknum yang melawan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, khususnya pasal yang melarang pengemudi mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai dengan pelat nomornya.

Sejumlah pelanggaran terhadap protokol pemuatan, batas berat, dan dimensi kendaraan telah didokumentasikan terkait dengan LLAJ, sesuai dengan Pasal 277 UU No. 22 tahun 2009. Sesuai dengan ketentuan⁴ Pasal 307 UU No. 22 Tahun 2009, pelanggar dibebankan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menerima surat tilang; kendaraan tersebut kemudian diizinkan untuk kembali beroperasi di jalan raya. Entitas dan operator yang terlibat dalam angkutan barang sering mengabaikan hal ini, karena mereka hanya mendapatkan sebagian dari denda yang timbul dari keuntungan yang dihasilkan dari melebihi batas kapasitas.⁵

Kota Batu, salah satu maksud wisata terkemuka di Jawa Timur, menghadapi tantangan dalam manajemen transportasi. Masuknya wisatawan ke Kota Batu dapat menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan di jalan, baik yang mempergunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Batu harus mempunyai kemampuan penegakan hukum yang kuat guna menjamin kelancaran dan keamanan lalu lintas. Dinas Perhubungan Kota Batu berkewajiban guna menjamin jikalau semua kendaraan

⁴ Undang Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 277 UU Lalu Lintas Angkutan Jalan

⁵ Undang Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 307 UU Lalu Lintas Angkutan Jalan

yang beroperasi di jalan umum di wilayah tersebut mematuhi standar teknis dan administratif yang disyaratkan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan.

Berdasarkan pengamatan, meskipun peraturan mengenai sertifikasi kendaraan telah jelas diatur dalam UU LLAJ, banyak ditemukan pelanggaran terkait kelengkapan administrasi kendaraan dan kelayakan teknis kendaraan di lapangan. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya kelengkapan administrasi kendaraan sering kali masih rendah, sehingga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yang diberlakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini antara lain adalah kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurang optimalnya mekanisme pengawasan yang ada.

Terdapat kejadian yang disebabkan oleh kelebihan muatan atau pelanggaran kendaraan angkutan barang yaitu pada 29 September 2021, di Jalan Raya Lewimalang-Bogor Puncak Cianjur (Bopunjur), sebuah truk pengangkut besi melebihi kapasitas terbalik. Kecelakaan itu menyebabkan satu pengendara motor meninggal dan satu orang mengalami luka. Truk dari arah Jakarta menuju Cianjur itu tak kuat menanjak dan rem tak kuat menahan beban muatan truk.

Kejadian selanjutnya, kecelakaan pada Rabu (10/8/2022) di Jalan Raya Puncak Bogor, Desa Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung. Tabrakan beruntun di turunan Selarong yang terjadi sekitar pukul 11.45 dan melibatkan truk bermuatan ayam seberat 2 ton.⁶

⁶ <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/01/23/kecelakaan-beruntun-di-puncak-bogor-mengakibatkan-17-korban-luka>, diakses pada 6 Oktober 2024 pukul 23.01 wib

Melihat akan hal itu, penulis akan meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya penegakan hukum serta terhadap sertifikasi kendaraan angkutan barang oleh Dinas Perhubungan dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU TERHADAP PELANGGARAN SERTIFIKASI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”** Riset ini diharapkan bisa memberikan kontribusi ke pengembangan kebijakan transportasi di Kota Batu, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan regulasi dalam rangka menyokong keselamatan dan ketertiban lalu lintas di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan terdapat rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana penegakan hukum terkait pelanggaran sertifikasi kendaraan angkutan barang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batu?
2. Apakah terdapat kendala pada Dinas Perhubungan Kota Batu dalam menegakkan hukum terhadap yang melanggar sertifikasi kendaraan angkutan barang?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat juga tujuan penulis dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bentuk praktik penegakan hukum atas sertifikasi kendaraan angkutan barang yang tidak sesuai dengan Undang Undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batu.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat kendala dari dinas perhubungan Kota Batu dalam menegakkan hukum bagi yang melanggar sertifikasi kendaraan angkutan barang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh Dinas Perhubungan Kota Batu, yang menekankan pada keselamatan pengemudi, berkaitan dengan bidang studi ini, yang mungkin terbukti bermanfaat secara pragmatis dan intelektual.

1.4.2 Manfaat Praktis

Riset ini memberikan informasi mengenai sertifikasi kendaraan angkutan barang, membantu pemilik dan pengemudi untuk mematuhi peraturan dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap peraturan tersebut.

1.5 Metode Penelitian

Guna memperoleh informasi yang kredibel terkait masalah yang dibahas, penulis memanfaatkan teknik berikut ini:

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Skripsi ini mempergunakan metodologi penelitian hukum empiris, termasuk wawancara dengan responden dan penghimpunan data dari berbagai sumber. Penulis mempergunakan riset yuridis empiris guna mengkaji

interaksi di antara anggota masyarakat. Riset ini menganalisis kehidupan masyarakat dari perspektif sosiologis.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Ketika penulis mewawancarai individu di lapangan, mereka mengumpulkan data primer.
- b. Artikel, buku, dan temuan riset yang berkaitan dengan penulisan merupakan contoh sumber data sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Istilah “observasi” menunjukkan proses pengumpulan informasi mengenai suatu subjek melalui pemeriksaan yang cermat untuk meningkatkan pemahaman mengenai subjek tersebut dan kondisi yang berlaku di lapangan.
- b. Wawancara, sebuah metode pengumpulan data, meliputi pengajuan serangkaian pertanyaan kepada narasumber dan mendokumentasikan jawaban-jawaban mereka.

4. Analisis Pengumpulan Data

Data-data tersebut kemudian akan diolah oleh penulis dengan mempergunakan metode yang diuraikan atau dijelaskan secara lebih jelas dan terperinci. Penulis menafsirkan data dengan mengoneksikan dengan literatur-literatur yang terkoneksi dengan persoalan yang akan penulis tulis dengan regulasi hukum dan dari temuan observasi wawancara dari DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU, Selanjutnya penulis akan menarik

konklusi dengan cara induktif yaitu suatu cara penarikan konklusi dari ketentuan yang mempunyai sifat khusus kepada yang bersifat umum.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika, teks ini disusun menjadi empat garis besar per bab untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang konsep dan keuntungan. Setiap garis besar akan diuraikan secara rinci di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berfungsi sebagai pendahuluan, memberikan informasi kontekstual mengenai pemilihan tematik penulis, perumusan masalah riset utama, tujuan dan manfaat riset, pendekatan metodologis, dan kerangka kerja riset secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II mengartikulasikan konsensus yang berlaku mengenai pelanggaran hukum yang terkait dengan masalah saat ini. Rincian penegakan hukum mengenai budak bermotor, Kerangka teori untuk pengajuan tesis, kerangka untuk menyajikan jalan yang tidak patuh, dan kerangka untuk menyajikan tesis transportasi yang tidak sesuai.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wawancara dan observasi yang diselenggarakan di Dinas Perhubungan Kota Batu, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009, dapat menghasilkan temuan riset awal.

BAB IV PENUTUP

Bab IV ialah bagian akhir dari riset ini, yang mencakup wawasan dan refleksi penulis, serta konklusi yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya.